

Turnitin FIX jurnal kampus myekbis

by Nia Ramadhanty

Submission date: 29-Feb-2024 10:27PM (UTC+0530)

Submission ID: 2258652628

File name: jurnal_kampus_myekbis.docx (89.16K)

Word count: 3778

Character count: 25469

The Effect of Local Tax To Road Infrastructure Development

(Case Study in Metro City, Lampung Province)

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan

(Studi Kasus pada Kota Metro, Provinsi Lampung)

Aliya Mutiara Yasmin¹⁾Nurmala²⁾Endah Yuni Puspitasari³⁾

¹⁾²⁾ Bandar Lampung Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi Dan Bisnis

³⁾ Program Studi Akuntansi Bisnis Digital, Jurusan Ekonomi Dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung

e-mail: aliyamtr17@gmail.com, nurmala@polinela.ac.id, endah.akuntansi@polinela.ac.id

Abstract

This thesis aims to determine how much local tax contributes to road infrastructure development in Metro City, Lampung Province. The dependent variables in this thesis are road infrastructure development and regional taxes as independent variables. The sampling method uses nonprobability sampling of saturated samples. The writing of this thesis uses classical assumption tests, simple linear regression, and partial tests. Data was analyzed using SPSS software version 25. The result of writing this thesis is that local taxes contribute to road infrastructure development and regional taxes do not significantly affect road infrastructure development in Metro City, Lampung Province.

Keywords : Local Taxes, Road Infrastructure, Contribution

PENDAHULUAN

Menurut Laporan Daya Saing Global 2023 *World Economic Forum* (WEF), Indonesia berada di peringkat ke-34 dari 141 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Urutan ini menunjukkan bahwasanya infrastruktur Indonesia masih dalam kondisi buruk, terbukti dari kuantitas dan kualitas infrastruktur yang ada, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara yang tidak dapat diandalkan. Infrastruktur merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai jembatan antara sistem lingkungan dan sosial serta penunjang sistem ekonomi dan sosial. Dalam situasi di mana sistem ini dapat

menjadi landasan pengambilan kebijakan (Kodoatie, 2003). Infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kecepatan dan perluasan perekonomian masyarakat. Peran infrastruktur jalan pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam bergerak dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Pasal 1 Ayat 4 yang mendefinisikan infrastruktur sebagai sarana teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menunjang jaringan struktural dan memberikan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. kelancaran pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan infrastruktur melalui sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Mardiasmo (2018) menyatakan bahwasanya salah satu instrumen kebijakan utama pemerintah daerah yang mempunyai peranan besar dalam upaya peningkatan kapasitas dan efektivitas pemerintahan daerah ialah anggaran daerah atau yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai ketentuan ³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Daerah merupakan pembayaran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang tunduk pada paksaan didasarkan atas hukum. Tidak dibalas secara langsung dan diterapkan untuk mendanai kebutuhan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan pemungutan pajak daerah ialah untuk membiayai terlaksananya prakarsa pemerintah, pembangunan, dan pengembangan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Subroto, 2022). Menurut Kementerian Keuangan, kabupaten dan kota wajib memungut tujuh jenis pajak yang berbeda: Pajak Air Tanah

(PAT), Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), ¹⁵ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Opsen Pajak.

Dalam rangka menjadikan Kota Metro sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan membantu memenuhi kebutuhan penduduk setempat, ¹⁴ Provinsi Lampung menetapkan Kota Metro sebagai salah satu Pusat Kegiatan Daerah (PKW) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009–2029. Provinsi kota metropolitan terbesar kedua di Lampung ialah kota metropolitan Metro. Peristiwa munculnya video viral melalui media sosial aplikasi tiktok pada tanggal 7 April 2023 yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat provinsi Lampung mengenai kondisi infrastruktur jalan yang ada pada daerah provinsi Lampung membuat masyarakat lainnya khususnya yang berada di Kota Metro mengeluhkesahkan kondisi infrastruktur jalan yang ada di Kota Metro. ⁴ Didasarkan atas artikel yang diunggah oleh Kupastuntas.co, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) pada 28 Februari 2023 lalu menjelaskan bahwasanya "Kondisi infrastruktur jalan yang baik itu ada 31,3% terus kondisi rusak ringan itu ada 22,59%, kondisi rusak sedang itu ada 35,9%, kondisi rusak berat itu ada 10,18%". Kemudian dilansir dari

Beritasatu.com pada 18 April 2023, Walikota Metro mengatakan 38% dari 567,8 km jalan yang ada di Kota Metro mengalami kerusakan berat dan DPUTR Kota Metro akan menjalankan perbaikan jalan yang diperkirakan sebanyak 107 titik ruas jalan di Kota Metro.

Uraian tersebut menggugah rasa ingin tahu penulis, dan ia berencana untuk meneliti lebih lanjut guna memasukkan temuan tersebut ke dalam tesisnya tentang kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan, dengan fokus di Kota Metro Provinsi Lampung. Mengingat pajak daerah antara lain untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penulis mengkaji apakah pajak daerah berdampak terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Perpajakan ialah metode pengumpulan pendapatan yang memberikan kontrol penuh kepada wajib pajak atas berapa banyak pajak yang harus mereka bayar, berapa banyak mereka dapat menghitung, membayar, dan bagaimana melaporkannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak ialah pembayaran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang dipungut dengan paksaan didasarkan atas

undang-undang, tanpa imbalan langsung dalam bentuk apa pun, dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan negara. kekayaan bagi masyarakat. Pasal 1 angka 2 UU KUP mendefinisikan Wajib Pajak sebagai setiap orang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indonesia menyetujui anggaran tahunan pemerintah daerah, yang dikenal sebagai APBD. Peraturan Daerah (Perda) menetapkan APBD, dan tahun anggaran ialah satu tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Cara utama untuk menghitung besaran pendapatan dan pengeluaran ialah dengan menerapkan APBD. APBD merupakan dokumen politik dalam arti merupakan kesepakatan legislatif dan komitmen eksekutif untuk membelanjakan uang negara untuk tujuan tertentu. APBD merupakan instrumen politik dan bukan sekedar persoalan teknis. Lebih dari itu, APBD disusun didasarkan atas kesepakatan dan merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunannya tidak didasarkan atas spesifikasi teknis atau hanya perhitungan keekonomian saja.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi penting kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan yang dipaksa oleh undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung, sesuai dengan Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Dana yang diperoleh dari pajak tersebut dimaksudkan untuk menunjang kebutuhan daerah sebesar-besarnya. kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah akan menerapkan pajak atau kontribusi yang diperlukan dari warganya untuk mencapai tujuan keseluruhan dan kepentingan daerah secara keseluruhan. Pembangunan jalan dan jembatan, penciptaan lapangan kerja baru, serta tujuan pembangunan dan pemerintah lainnya ialah beberapa contohnya. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang diterapkan pemerintah untuk mendanai program kerjanya, selain membantu pembangunan suatu daerah.

Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur suatu negara ialah mesin perekonomiannya, dan dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan memajukan pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi sangat terbantu oleh pembangunan infrastruktur, baik nasional maupun regional.

Anggaran negara disisihkan untuk infrastruktur, dan pemerintah menerapkan

sejumlah inisiatif yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur. Penyelenggaraan infrastruktur jalan, khususnya jalan provinsi dan jalan kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, juga menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Kekuasaan dalam pengelolaan jalan meliputi pembinaan, pengawasan, pembinaan, dan pengaturan jalan.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi

Data time series yaitu total data pajak daerah dari Laporan Realisasi Modal Pembangunan Infrastruktur, Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kota Metro, dan data pembangunan infrastruktur jalan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Infrastruktur Kota, merupakan populasi yang diterapkan dalam penelitian ini. . Populasi dalam penelitian ini ialah penduduk berusia 10 tahun karena didasarkan atas pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Jalan Kota Metro periode tahun 2013–2022.

Sampel

Pengambilan sampel non-probabilitas ialah metode yang diterapkan; cara ini tidak menjamin bahwasanya setiap komponen atau anggota populasi akan dipilih secara acak untuk keperluan pengambilan sampel.

Dengan kata lain sampel jenuh ialah sensus yang menerapkan setiap orang dalam populasi sebagai sampel. Penelitian ini menerapkan teknik ini (Sujarweni, 2020).

Variabel Independen

Suatu variabel yang mempengaruhi perubahan variabel lain disebut sebagai variabel bebas atau variabel bebas. Pajak daerah Kota Metro dijadikan sebagai variabel independen penelitian.

Variabel Dependen

Suatu variabel yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dan dianggap sebagai akibat dari adanya variabel bebas disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat penelitian ialah Kota Metro, infrastruktur jalan yang berkembang di Lampung.

Teknik Analisis Data

Uji autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas ialah uji asumsi tradisional yang diterapkan.

Uji Normalitas

Menurut Utama (2018), tujuan uji normalitas ialah untuk mengetahui apakah dalam semua modalitas regresi, variabel bebas, variabel terikat, atau keduanya berdistribusi teratur. Untuk memastikan apakah data observasi berdistribusi normal atau tidak, diterapkan metode statistik yang disebut uji normalitas. Model regresi yang baik ialah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Distribusi data model regresi yang layak ialah normal

atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah suatu data normal atau tidak secara statistik, Kolmogorov-Smirnov menyarankan untuk menerapkan uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini juga mencakup P-Plot normal. Hasil uji normalitas juga dapat diketahui dengan melihat sebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik plot normal.

Uji Heteroskedastisitas

Jika varians error term pada model persamaan regresi tidak konstan, maka keadaan tersebut disebut heteroskedastisitas. Berikut ialah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya masalah heteroskedastisitas:

- a. Model persamaan regresi yang diterapkan kurang akurat.
- b. Jumlah outlier di antara observasi sampel.
- c. Model persamaan regresi mempunyai skewness pada satu atau lebih variabel independen.
- d. Kesalahan dalam penerjemahan data dan penggunaan bentuk persamaan.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi ialah suatu kondisi dimana *error term* setiap observasi berkorelasi dengan *error term* observasi lainnya. Jika autokorelasi terjadi pada data *cross-section*, maka masalah autokorelasi tersebut dinamakan dengan *spatial autocorrelation*, dan jika autokorelasi terjadi pada *time series*, maka masalah

autokorelasi tersebut dinamakan serial *correlation/autocorrelation*. Beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam model persamaan regresi diantaranya ialah pengujian menerapkan uji Runs (*Runs test*) dan pengujian menerapkan uji Durbin Watson (*Durbin Watson test*).

Regresi Linear Sederhana

Hubungan linier antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dikenal dengan analisis regresi linier sederhana (Suharyadi dan Purwanto, 2020). Nilai variabel terikat dapat diprediksi apakah nilai variabel bebas naik atau turun, dan analisis regresi sederhana dapat diterapkan untuk memastikan apakah terdapat hubungan positif atau negatif antara variabel bebas dan variabel terikat. Data yang diterapkan dalam regresi sederhana seringkali memiliki skala rasio atau interval. Rumus yang diterapkan dalam penelitian ini berasal dari statistik ekonomi dan keuangan dan menghasilkan regresi linier sederhana jika diterapkan pada persamaan regresi sederhana (Suharyadi dan Purwanto, 2020) :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Pembangunan Infrastruktur Jalan

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Pajak Daerah

e = Standar Error

Dengan menerapkan pajak daerah sebagai variabel independen, metode ini diterapkan untuk meramalkan dampak variabel dependen (pembangunan infrastruktur jalan). Data yang diperoleh kemudian dianalisis regresi dengan menerapkan software SPSS 25 dan diberikan penjelasan deskriptif. Dalam suatu persamaan, suatu variabel terikat (Y) diprediksi dengan menerapkan analisis regresi linier sederhana didasarkan atas satu variabel bebas (X).

Uji Hipotesis

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2020), pengujian hipotesis dijalankan untuk memverifikasi kebenaran suatu klaim secara statistik dan menentukan apakah menerima atau menolaknya. Uji parsial (uji t) diterapkan dalam pengujian hipotesis. Penelitian ini menerapkan uji-t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Saat menjalankan uji parsial ini, nilai t diperiksa pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, dimana:

1. Jika nilai probabilitas atau Sig. (2-tailed) < 0,05 maka H1 diterima.
2. Jika nilai probabilitas atau Sig. (2-tailed) > 0,05 maka H1 ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama dan paling signifikan, maka pajak memainkan peranan penting dalam mendorong pembangunan nasional. Pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah, menerapkan pendapatan pajak yang dihasilkan untuk mendanai pembangunan. Karena pemungutan pajak daerah dijalankan sesuai dengan undang-undang negara Indonesia yang relevan, maka hal ini dapat dianggap dilaksanakan. Pemerintah Kota Metro menerima sepertiga dari seluruh pendapatan daerahnya dari sektor pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan utama. Tujuan utama dibentuknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah, sekaligus memberikan pengawasan lebih terhadap penyelenggaraan sistem perpajakan di Kota Metro.

Gambaran mengenai penerimaan pajak daerah pemerintahan Kota Metro tahun 2013 – 2022 dimuat penulis dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Kota Metro 2013 – 2022

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	
2013	6.807.598.744	
2014	12.651.879.441	
2015	14.309.185.603	

2016	14.281.738.649
2017	18.209.276.443
2018	21.731.062.460
2019	27.205.358.060
2020	28.845.377.140
2021	33.105.926.630
2022	36.716.010.320

Sumber: BPS Kota Metro Dalam Angka
Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan Daerah (2013 – 2022)

Prasarana transportasi darat meliputi seluruh komponen suatu jalan, seperti bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapan lalu lintas, baik yang berada di atas tanah, di bawah tanah, di atas permukaan air, atau kedua-duanya. air, kecuali jalur kabel, truk, dan kereta api.

Istilah "manajemen jalan" mengacu pada perencanaan, pengarahan, konstruksi, dan pengamatan jalan raya. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan infrastruktur jalan. Secara khusus kewenangan ini meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Realisasi pembangunan infrastruktur jalan Kota Metro tahun 2013 – 2022 dimuat penulis dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Metro 2013 – 2022

Tahun	Realisasi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Rp)
2013	7.905.480.000
2014	31.912.744.000
2015	24.201.170.000
2016	112.750.115.000
2017	73.647.852.000
2018	30.856.102.000
2019	23.496.127.873
2020	14.518.648.400
2021	14.000.365.294
2022	13.502.550.500

Sumber: Lpsekotametro.go.id (data diolah)

Alokasi dana pembangunan infrastruktur jalan di Kota Metro yang mengalami kenaikan dan penurunan ini dipengaruhi pula dengan visi dan misi dari Walikota Metro yang menjabat karena setiap Walikota Metro memiliki titik fokus atau prioritas pembangunan Kota Metro yang berbeda.

6 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

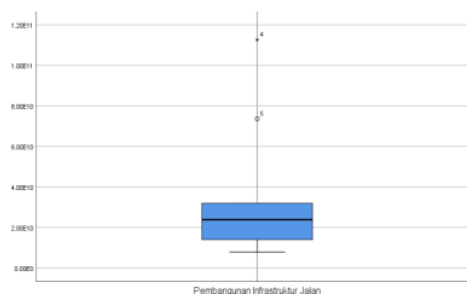
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000011
	Std. Deviation	31215736319.8
		0706800
Most Differences	Extreme Absolute	.344
	Positive	.344
	Negative	-.177

Test Statistic	.344
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001 ^c

Didasarkan atas tabel 3 *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan hasil uji normalitas data diperoleh nilai *asymptotic significant* sebesar 0,001 dimana apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data dianggap berdistribusi tidak normal. Sehingga dijalankan *outlier* data.

Outlier

Outlier merupakan data yang memiliki karakteristik yang berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk variabel tunggal atau variabel kombinasi sehingga data yang mengalami hal tersebut harus dikurangi atau dihilangkan. Berikut data *outlier* yang penulis sajikan:



Gambar `1. *Outlier*

Didasarkan atas gambar 1 *outlier* data yang harus di *outlier* atau dikurangi ialah data pada baris 4 dan 5. Sehingga diperoleh data setelah di *outlier* sebagai berikut:

Tabel 4. Data Setelah *Outlier*

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Infrastruktur Jalan
2013	6.807.598.744	7.905.480.000
2014	12.651.879.441	31.912.744.000
2015	14.309.185.603	24.201.170.000
2018	21.731.062.460	30.856.102.000
2019	27.205.358.060	23.496.127.873
2020	28.845.377.140	14.518.648.400
2021	33.105.926.630	14.000.365.294
2022	36.716.010.320	13.502.550.500

Setelah diperoleh data pada tabel 4 data setelah outlier selanjutnya diuji kembali menerapkan uji *kolmogorov smirnov* untuk menguji normalitas data.

Uji Kolmogorov Smirnov (KS) setelah outlier

Data setelah dijalankan *outlier* kemudian dijalankan uji normalitas kembali dengan menerapkan uji *kolmogorov smirnov* untuk melihat normalitas data setelah di *outlier*.

Tabel 5. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test After Oulier*

		Unstandardized Residual
N		8
Normal	Mean	-.000001
Parameters ^{a,b}		0
	Std. Deviation	8598845 306.4329 1900
Most Extreme	Absolute	.180
Differences	Positive	.178
	Negative	-.180
Test Statistic		.180

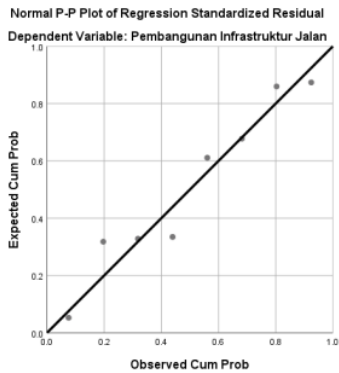
Asymp. Sig. (2-tailed) .200^{c,d}

Setelah data di *outlier* dijalankan uji normalitas kembali oleh penulis, sehingga diperoleh uji normalitas data nilai *asymptotic significant* sebesar 0,200 dimana nilainya lebih besar dari 0,05 maka data pada uji yang penulis lakukan telah berdistribusi normal.

Uji Probabilty Plot (P-Plot)

Sebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik plot normal juga dapat diterapkan untuk mengetahui hasil uji normalitas. Data harus tersebar di sekeliling garis, mengikuti arah garis diagonal, dan menunjukkan pola sebaran normal agar model regresi dianggap memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, tidak mengikuti arah garis diagonal, dan tidak menunjukkan pola sebaran normal, maka model regresi dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selanjutnya penulis sajikan grafik menerapkan *Probability Plot* dalam gambar dibawah merupakan Uji *Probabilty Plot* (P-Plot) sebagai berikut:

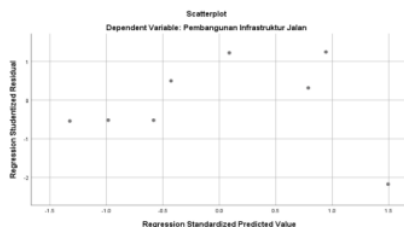


Gambar 2. Probability Plot

Didasarkan atas gambar 2 grafik P-Plot dapat dilihat bahwasanya sebaran titik yang mendekati garis diagonal sehingga data pada uji dapat dikatakan bahwasanya data ialah normal.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas ialah bertujuan untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antar pengamatan. Berikut penulis sajikan hasil uji heterokedastisitas dengan menerapkan uji *scatterplot* pada SPSS:



Gambar 3. Scatterplot

Didasarkan atas hasil uji pada gambar 3 *scatterplot* dapat diketahui bahwasanya titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. sehingga dapat disimpulkan bahwasanya model regresi ini

tidak terdapat heteroskedastisitas dan dapat dilanjutkan pengujian ke tahap selanjutnya.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*disturbance term-ed*) pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini diterapkan uji *Run Test*. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dijalankan dengan *runs test* seperti pada hasil pengujian berikut:

Tabel 6. *Runs Test*

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-675431114.69773
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	4
Total Cases	8
Number of Runs	3
Z	-1.146
Asymp. Sig. (2-tailed)	.252

Didasarkan atas hasil uji dengan menerapkan *runs test* pada tabel 6 dapat dilihat bahwasanya nilai sig. ialah $0,252 > 0,05$ dimana hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak terjadi autokorelasi.

Regresi Linear Sederhana

Regresi Linear Sederhana merupakan salah satu bentuk pengujian hipotesis yang penulis gunakan untuk mengetahui pengaruh dari pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota

Metro. Berikut hasil perhitungan uji regresi linear sederhana menerapkan SPSS

Tabel 7. *Coefficients^a*

Model	B	Std. Error	Standardized Coefficients		T	Sig.
			Beta			
1 (Constant)	24213565	81899			2.9	.025
	845.794	30016.565			.57	
Pajak Daerah	-.184	.331	-.221		-.5	.599
					.55	

Didasarkan atas tabel 7 *coefficients^a* yang disajikan didapatkan perolehan persamaan regresi linear sederhana nilai *constant* (a) sebesar 24213565845,794 dengan nilai pajak daerah (b)-0,184 sehingga model persamaan regresi diperoleh:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 24213565845,794 - 0,184X + e$$

Didasarkan atas persamaan regresi sederhana di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai *constant* (a) sebesar 24213565845,794 menyatakan jika pajak daerah tidak mengalami pembangunan infrastruktur jalan maka bernilai tetap sebesar 24213565845,794
2. Koefisien regresi X (Pajak Daerah) (b) sebesar 0,184 menyatakan bahwasanya jika pajak daerah mengalami penurunan satu satuan maka nilai pembangunan

mengalami kenaikan sebesar 0,184. Koefisien negatif artinya terjadi hubungan tidak searah antara pajak daerah dan pembangunan infrastruktur jalan.

Uji T (Parsial)

Pengujian penelitian menerapkan uji T (parsial) bertujuan untuk menguji hipotesis pada penelitian penulis. Berikut penulis sajikan hasil pengujian uji T (parsial) dengan menerapkan SPSS:

Tabel 8. *Coefficients^a*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	24213565845.794	81899.30016565			2.957	.025
Pajak Daerah	-.184	.331	-.221		-.555	.599

Pada hasil tabel 8 *Coefficients^a* yang penulis sajikan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,599 dimana nilai signifikansi lebih besar > dari nilai probabilitas 0,05 serta T hitung untuk Df = n - k atau 8 - 2 = 6, maka diperoleh nilai T tabel (dapat dilihat pada lampiran 1) sebesar 2,44691 > dari T hitung sebesar -0,555 artinya mengandung penjelasan bahwasanya pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur jalan sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

Interpretasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ialah untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Metro Provinsi

Lampung. Berikut interpretasi data penelitian penulis.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Metro

Hasil uji T menunjukkan T hitung sebesar $2,101 < T$ tabel sebesar $2,30600$ dan nilai signifikansi sebesar $0,809 > 0,05$. Temuan ini mendukung penolakan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwasanya pajak daerah tidak mempunyai dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

Pembangunan infrastruktur jalan tidak terlalu terpengaruh oleh pajak daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain alokasi dana yang berbeda sehingga dana pajak daerah dapat diterapkan untuk berbagai program atau kebutuhan lainnya. Keterbatasan anggaran juga menjadi alasan lain yang mungkin menghambat penerimaan pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan pajak daerah. membiayai seluruh proyek infrastruktur yang direncanakan, dan efektivitas pengelolaan dana juga mempengaruhi bagaimana dana pajak daerah dikelola dan diterapkan secara efektif untuk menentukan seberapa banyak infrastruktur jalan yang dikembangkan dan apakah ada sumber pendanaan lain yang dilibatkan. Selain pajak daerah, proyek pembangunan infrastruktur jalan juga bisa mendapatkan pendanaan dari sumber lain seperti dana

pemerintahan pusat, pinjaman, atau investasi swasta. Pembangunan infrastruktur ini juga dipengaruhi oleh era kepemimpinan Walikota Metro yang menjabat dikarenakan setiap Walikota Metro memiliki prioritas yang berbeda untuk pembangunan Kota Metro.

Penulisan skripsi oleh penulis mengenai pengaruh pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan bertolak belakang dengan penelitian oleh Siregar (2021) yang menyatakan bahwasanya pemungutan pajak daerah yang semakin besar akan berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pajak daerah berdampak besar terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Didasarkan atas penelitian penulis mengenai pengaruh pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan dengan studi kasus di Kota Metro maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan pada pembangunan infrastruktur jalan dikarenakan alokasi anggaran yang beragam, prioritas penggunaan dana yang beragam, atau dapat pula dikarenakan birokrasi yang memperlambat proses penggunaan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini terjadi pula dikarenakan titik fokus atau prioritas pembangunan di Kota Metro berbeda

didasarkan atas visi dan misi dari setiap Walikota Metro pada masa kepemimpinannya. Pajak daerah secara tidak langsung memengaruhi pembangunan infrastruktur jalan dengan menjadi salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah Kota Metro diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rencana anggaran untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur termasuk jalan sehingga meskipun tidak secara langsung, pajak daerah tetap berperan dalam menyokong pembangunan infrastruktur jalan.

Saran

Didasarkan atas penelitian penulis mengenai kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan dengan studi kasus di Kota Metro maka Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Metro dapat menjalankan perbaikan dalam proses birokrasi guna pembangunan infrastruktur Kota Metro dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Kota Metro yang dialokasikan kepada prioritas pembangunan untuk Kota Metro yang lebih baik.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya dengan analisis serupa dan menambahkannya variabel lain serta memperluas sumber penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arby. (2023). Realita Infrastruktur di Kota Metro. Lampung: Kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2023/04/26/realita-infrastruktur-di-kota-metro/>. Diakses pada 2 Juli 2023.
- BPS Kota Metro. (2023). Kota Metro Dalam Angka.
- Kodoatie., Robert J. (2003). Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI (Ed.III).
- Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 pasal 1 ayat 4 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyedia Infrastruktur.
- Subroto, V. K. (2022). Memahami Definisi, Fungsi, Dan Jenis Pajak Daerah. <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Memahami-Definisi-Fungsi-dan-Jenis-Pajak-Daerah/>. Diakses pada 8 Juli 2023.
- Sugiono. (2017) . Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto. (2020) . Statistika. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2020). Metodologi Penelitian. Yogyakarta:Pustaka Baru.
- The Global Competitiveness Report. (2019). The Global Competitiveness Report. In World Economic Forum.

Triono. (2023). Jalan Rusak Walikota Metro Lampung Timbun Lubang dengan Batu. Lampung: Beritasatu.com.

<https://www.beritasatu.com/nusantara/1039037/jalan-rusak-wali-kota-metro-lampung-timbun-lubang-dengan-batu/all>. Diakses pada 12 Juli 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

Utama, M. A. B. (2018). Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Islam Yogyakarta, 4(3), 1-17.

Turnitin FIX jurnal kampus myekbis

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	3%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Morgan Park High School Student Paper	2%
4	mail.kupastuntas.co Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
6	www.researchgate.net Internet Source	1%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
8	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	1%
9	jurnal.polinela.ac.id Internet Source	1%

10	repository-feb.unpak.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Trisakti University Student Paper	1 %
12	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	1 %
13	Meggy Marchia Pandelaki, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan. "ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018 Publication	1 %
14	repo.itera.ac.id Internet Source	1 %
15	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Turnitin FIX jurnal kampus myekbis

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
